

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Ghofar, *perbandingan kekuasaan presiden setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju*. jakarta, kencana, 2009.
- Dahlan Thaib, *implementasi sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945, liberty*, yogyakarta, 1993.
- Didi Nazmi Yunas, *konsepsi negara hukum*, angkasa raya, padang, 1992.
- Fakultas Hukum UNPAS, *panduan penyusunan penulisan hukum (tugas akhir)*, universitas pasundan, bandung, 2015.
- Hamdan Zoelva, *pemakzulan Presiden di Indonesia*, sinar gramika, jakarta, 2013.
- I Dewa Gede Atmadja, *hukum konstitusi*, setara pres, malang, 2012.
- Inu Kencana syafiie, *sistem pemerintahan indonesia*, rineka cipta, yogyakarta, 2011.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Konpress, Jakarta, 2012.
- Joeniarto, *sejarah ketatanegaraan republik indonesia*, jakarta, bina Askara, 1986.
- Mahfud M.D., *hukum dan pilar-pilar demokrasi*, gama media , yogyakarta, 1999.
- Malik, *telaah makna hukum putusan mahkamah konstitusi yang final dan mengikat*. Sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, jurnal konstitusi, Vol. 6 No.1, april 2009.
- Maria farida, *ilmu perundang-undangan*, kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Aditama, semarang, 2011.
- Patrialis Akbar, *hubungan Lembaga Negara Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto presiden*, Gramedia, Jakarta, 2012.

Ronny Hanitijo, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, jakarta, cet IV ghalia indonesia, 1990.

Sobrin Malian, *gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 1945*, UII press, yogyakarta, 2001.

Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, rajawali, Jakarta, 1985.

Sumali, *reduksi kekuasaan eksekutif dibidang peraturan pengganti undang-undang (perppu)*, UMM press, malang, Agustus.

Suwanto, *peralihan kekuasaan kajian teoritis da yuridis terhadap pidato awaksar*, grand media pustaka, jakarta, 1999.

Von Schmid, J.J., *Ahli-ahli pikir besar tentang negara dan hukum*, P.T. pembangunan, jakarta, 1980.

B. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sebelum dan Pasca Amandemen I,II,III,IV.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi..

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan MK no 76/PUU/XII/2014.

Salinan putusan MK, dalam amar purusan MK perkara No.76/PUU-
XXI/2014.

C. Sumber Lainnya

<http://www.wikipedia.com/>

<http://www.legalakses.com/>

<http://www.google.com/>

hukumonline.com.

<http://www.ensiklopedia.com/>

indonesia.mntunpatti.ac.id

<http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1601-jumlah-korupsi-meningkat-pada-2013>